

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memulai penjelasan dengan menunjukkan latar belakang penelitian skripsi ini dilakukan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dijelaskan untuk menggambarkan pokok utama penelitian ini disertai manfaat penelitian. Bab ini kemudian mengulas mengenai pemahaman dasar tentang partai politik kemudian dilanjutkan mengenai institusionalisasi partai politik. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambarkan dalam skema berpikir. Untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

1.1. Latar Belakang

Partai politik hadir sebagai salah satu upaya perwujudan negara ke arah yang lebih demokratis, karena warga negaranya dapat berpartisipasi langsung dalam mengelola kehidupan berbangsa maupun bernegara. Partai politik merupakan sekumpulan orang di dalam organisasi politik yang sama dan memiliki asas, tujuan, dan visi-misi yang sama untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam sistem politik Indonesia partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi (Miriam, 2008).

Keberadaan partai politik dihadapkan pada kondisi paradoksal, dimana tingkat kepercayaan publik terus menurun seakan menjadi tren dikalangan masyarakat. Jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik (terhadap parpol) saat itu relatif tinggi, namun belakangan justru hasil survei menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik kepada partai politik. Berdasarkan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik rendah, dari 12 institusi partai politik berada paling di bawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 64% (Detik.com, 2024).

Hal ini menjadi hal yang kontradiktif jika melihat sejarah lahirnya partai politik sebagai wadah perwujudan demokrasi. Secara umum, tumbuhnya rasa tidak percaya dan sikap skeptis publik pada partai politik sebagaimana tergambar dalam beberapa kasus yang terjadi yang melibatkan aktivis partai, konflik internal yang gaduh di banyak pemberitaan, performa partai yang masih jauh dari harapan, dan pelembagaan partai yang jalan di tempat adalah beberapa masalah yang masih menghinggapi partai politik di Indonesia hingga saat ini. Padahal partai politik dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

Kualitas partai politik berelasi kuat dengan proses pelembagaan, dalam konteks ini upaya untuk meninjau proses pelembagaan partai politik merupakan

bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas (Randall dan Lars, 2002). Huntington mengatakan pelembagaan merupakan proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh kestabilan (Pamungkas, 2011). Atau dalam pengertian Randall dan Lars (2002), pelembagaan diartikan sebagai proses dimana partai menjadi stabil (mantap) dalam hal pola perilaku yang terintegrasi maupun dalam hal sikap (attitude) dan budaya. Tidak hanya persoalan pelembagaan partai politik yang perlu diatur dengan sedemikian baik tetapi partai pula harus mampu mengikuti perubahan-perubahan pada sistem politik agar tetap mampu berkompetisi partai politik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, agar dapat bertahan dan meraih dukungan ataupun simpati yang besar dari masyarakat (Romli, 2008).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Moderat. Partai ini didirikan oleh Presiden Indonesia ke-4 Dr. K.H.Abdurrahman Wahid, Lc. di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriah) yang mendapat dukungan kuat dari para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Mustofa Bisri, Zuhdi Fatkur dan Muhith Muzadi. Sebagai partai yang didirikan oleh kyai Nahdlatul Ulama, PKB memiliki dukungan historis dengan kalangan nahdliyin. Partai ini adalah anak kandung dari NU, begitu narasi yang kuat dikumandangkan dari tokoh-tokoh nahdliyin. Hasil pemilu memperkuat narasi tersebut karena basis pemilih PKB berada di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini tampak dari porsi sumbangan pemilih dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

PKB di Provinsi Sulawesi Selatan mencetak rekor di Pemilu 2024. Jumlah perolehan suaranya meningkat begitu tajam. Peningkatan capaian suara itu, tidak terlepas dari banyaknya kalangan dan tokoh bergabung dengan PKB Sulsel. Ini yang menguatkan posisi partai tersebut untuk menduduki posisi penting di DPRD Provinsi Sulsel dan di beberapa DPRD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekapitulasi suara pemilu 2024 secara berjenjang di Sulsel, PKB berhasil meraih keuntungan yang signifikan. Bahkan, partai ini mencatat sejarah baru dengan mempertahankan 8 kursi dan berpotensi mendapatkan kursi pimpinan (Wakil Ketua) di DPRD Sulsel. Bukan hanya itu, PKB juga meraih 7 kursi pimpinan di DPRD Kabupaten/kota di Sulsel. Masing-masing 1 kursi ketua DPRD di Takalar, dan 6 kursi wakil ketua di Jeneponto, Bulukumba, Bone, Wajo, Pinrang, dan Enrekang.

Pada level kabupaten/kota, DPC PKB Kota Makassar mampu memenuhi target dengan komposisi 5-2-1 di Pileg 2024. Capaian ini begitu luar biasa dibanding hasil 2019 sebelumnya. Komposisi 5-2-1 ialah komposisi 5 kursi DPRD Makassar, 2 kursi DPRD Sulsel dari Dapil Makassar A dan B, serta 1 kursi DPR RI

Dapil Sulsel 1. Ketua DPC PKB Makassar, Fauzi Andi Wawo mengatakan raihan partainya sudah bisa dikunci setelah DA Hasil dari KPU Makassar selesai. Partai yang dipimpinnya berhasil naik dari 1 menjadi 5 kursi dan membentuk fraksi utuh. Fauzi merincikan perolehan kursi DPRD Sulsel Dapil Makassar A yang ia duduki sendiri. Petahana ini mendapatkan kursi urutan 8 dengan total 26.707 suara dan suara pribadi 17.758 suara.

Tabel 1. Perbandingan Suara dan Kursi PKB DPRD Kota Makassar Tahun 2019 dan 2024

TAHUN PEMILU	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
2019	30.498	1 Kursi
2024	66.934	5 Kursi

Sumber : Kompas.id

Pada DPRD Makassar, PKB mampu mendudukkan semua Calegnya di lima Dapil. Mereka berhasil mengumpulkan total 66.888 suara. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Sulsel, Syamsu Rizal mengapresiasi capaian DPC Makassar pada Pileg 2024 ini. Dengan memberikan jaminan bahwa semua aspirasi yang diserap selama masa kampanye akan dijalankan. Aspirasi Caleg yang tidak duduk akan tetap dikerjakan oleh mereka yang diamanahkan duduk di DPRD Makassar di Dapil tersebut. Diketahui dari Pemilu 2019, PKB Makassar hanya meraih satu kursi di DPRD Makassar, yang diisi oleh Imam Musakkar. Berikut daftar Caleg PKB yang duduk di DPRD Makassar hasil Pemilu 2024.

Tabel 2. Caleg Terpilih PKB di DPRD Kota Makassar Tahun 2024

DAPIL	SUARA PARTAI	NAMA CALEG TERPILIH	SUARA CALEG
1	21.088	Fahrizal Arrahman Husain	12.103
2	9.475	Basdir	3.152
3	10.628	Zulhajar	3.730
4	13.530	Imam Musakkar	6.455
5	12.167	Andi Makmur Burhanuddin	2.208

Sumber : Kompas.id

Ada beberapa hal menarik yang peneliti lihat dari perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Makassar. Sebagai sebuah partai yang didominasi oleh orang NU, PKB mampu memperoleh hasil signifikan di Pemilu 2024. Dari hanya 1 kursi di DPRD Kota Makassar, kini menjadi 5 kursi dan memiliki satu fraksi tersendiri. Caleg-caleg yang terpilih juga berasal dari latar belakang yang sangat beragam, seperti dokter dan akademisi. PKB mampu melakukan konsolidasi internal sedemikian rupa sehingga menghasilkan capaian yang membanggakan di

Pemilu 2024 dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Terjadi perubahan dan hasil yang signifikan dalam kerja politik yang dilakukan PKB Kota Makassar. Peneliti mengasumsikan bahwa secara kelembagaan ada hal yang berbeda dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Makassar untuk menghadapi Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Institusionalisasi Partai Politik Menghadapi Pemilu 2024 : DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar membangun dan mengembangkan partainya dalam proses institusionalisasi partai?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu : Untuk mengetahui upaya DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar membangun dan mengembangkan partainya dalam proses institusionalisasi partai.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang institusionalisasi partai politik.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait institusionalisasi partai politik dalam menghadapi sebuah pemilu yang berdampak pada makin luasnya jangkauan pemilih yang diraih.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai upaya partai-partai politik dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu dan upaya untuk meraih peningkatan kursi maupun suara.
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji bagaimana dimensi identitas dan jangkauan publik pada suatu partai terlihat semakin berusaha untuk bersifat *catch-all*.

- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi setiap partai politik dalam membangun institusi kepartaian yang dinamis, solid, dan mampu menjawab perkembangan zaman di setiap pemilu.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, dalam jurnal *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* berjudul “Institusionalisasi Dan Ketahanan Partai Dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (Agustino, 2023). Demokrasi politik di Indonesia pada era reformasi memberikan gambaran berbeda dengan era sebelumnya. Jurnal ini membahas dan menganalisis mengenai institusionalisasi dan ketahanan partai pada demokrasi elektoral Indonesia era reformasi. Jurnal ini menunjukkan tiga hal. Pertama, pada era reformasi, partai-partai mengalami goncangan karena berubahnya rezim demokrasi dari demokrasi terkontrol dan represif menjadi demokrasi liberal yang mengedepankan fungsi elektoral. Kedua, tuntutan tentang pentingnya institusionalisasi partai politik sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi bagi peningkatan kualitas demokrasi yang dicirikan dengan menguatnya identitas partai-partai politik. Ketiga, menguatnya peran kepemimpinan partai politik sebagai suluh bagi ketahanan partai politik di dalam menghadapi demokrasi elektoral dan disisi lain tetap mempertahankan ciri ideologis dan kultur partai.

Kedua, dalam jurnal *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* berjudul “Pelebagaan Partai Politik (Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang)” (Fahrezi, 2023). Partai politik di Indonesia menempati urutan terbawah sebagai lembaga paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah partai politik belum mampu melembagakan organisasinya dengan baik. Adanya penelitian ini guna menganalisa proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang beserta kaitannya dengan hasil elektoral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PSI Kota Malang mencapai model pelembagaan dua dimana dua derajat memiliki tingkat pelembagaan tinggi sedangkan dua lainnya rendah. Dengan uraian, derajat kesisteman (*systemness*) dan derajat identitas nilai (*value infusion*) terbilang masih jauh dari kata ideal, sedangkan derajat otonomi (*decisional autonomy*) dan derajat

citra publik (*reification*) mempunyai pelembagaan yang relatif tinggi. Penelitian ini juga menampilkan bahwa terdapat pengaruh antara pelembagaan PSI Kota Malang terhadap hasil Pileg 2019 dimana derajat reification cenderung memengaruhi terhadap kenaikan suara partai sedangkan sebaliknya derajat value infusion cenderung berpengaruh pada penurunan suara partai.

Ketiga, dalam jurnal *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* berjudul “Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Partai Demokrat di Era Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhyono Periode 2020-2022” (Hasibuan & Pasha, 2024). Penelitian ini membahas tentang kelembagaan Partai Demokrat di era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) periode 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat di era kepemimpinan AHY periode 2020-2022 telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penguatan kelembagaan partai yang ideal. Namun, identifikasi Partai Demokrat sebagai Partai Keluarga dengan penempatan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Edi Baskoro Yudhyono (Ibas) sebagai Ketua Fraksi Partai dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2020-2025 menjadi tantangan tersendiri dalam proses penguatan kelembagaan partai. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat di era kepemimpinan AHY periode 2020-2022 memiliki tingkat kelembagaan yang relatif kuat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun Partai Demokrat diidentifikasi sebagai Partai Keluarga, namun pengaruh faktor partai keluarga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelemahan kelembagaan Partai Demokrat di era kepemimpinan AHY periode 2020-2022.

Penelitian ini memperlihatkan posisi yang berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya di atas. Penelitian ini berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar yang selama ini diketahui merupakan partai berbasis Islam NU. PKB memperoleh kursi pertamanya di DPRD Kota Makassar pada tahun 2019 dengan 1 kursi, kemudian meningkat menjadi 5 kursi di tahun 2024 dengan persebaran yang merata di semua dapil. Penulis memiliki asumsi bahwa DPC PKB Kota Makassar berhasil pada Pemilu 2024 karena melakukan institusionalisasi partai yang tepat sehingga mampu menjangkau pemilih yang lebih luas, tidak hanya sekedar pemilih Islam, dan hal inilah membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat penelitian tentang institusionalisasi PKB di Kota Makassar.

1.6. Partai Politik

1.6.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun materil. Sementara itu, Miriam Budiardjo mengatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Pablo Onate, partai politik adalah organisasi yang stabil dan permanen untuk sementara waktu, yang didasarkan pada ideologi dan program pemerintah untuk menentukan tujuan, yang berupaya mencapai tujuan tersebut melalui pelaksanaan kekuasaan politik, dan berusaha untuk menduduki posisi publik. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Menurut Edmund Burke (Burke, 2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempermosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (Neuman, 1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah :

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menyalurkan informasi dari masyarakat untuk disampaikan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disampaikan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya. Misalnya negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang menganut paham otorokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tuju pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.

Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari konsensus.

7. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya diproduksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik . yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki sistem ideologi yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. Masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik. Misalnya dengan merumuskan AD/ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi antar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktivitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

9. Profesionalisme Partai Politik

Sistem persaingan politik dan control media masa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu dipikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (*sustainable*). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standar dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri.

1.6.2. Jenis-Jenis Partai Politik

Menurut Mufti (2013 : 126-127) secara umum klasifikasi dan sistem kepartaian dapat dibagi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Lalu berdasarkan ideologi kepentingan, partai terbagi atas sebagai berikut :

1. Partai kader, yang sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal.

2. Partai massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada diluar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa.

3. Partai diktatorial merupakan subtype dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai.

4. Partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah memenangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Kebanyakan sistem politik yang muncul dinegara berkembang pada dasarnya dalam dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Pertama, sistem politik yang berbentuk demokrasi politik. Model sistem ini dicirikan oleh adanya lembaga-lembaga politik berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang relatif otonom dan independen. Kedua, sistem politik dengan model demokrasi terpimpin. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam eksekutif yang memungkinkan mereka lebih berkuasa dari legislatif. Ketiga, oligarki pembangunan. Sistem ini semula ditujukan untuk mempercepat demokratisasi dan modernisasi. Keempat, sistem politik yang berbentuk oligarki totaliter. Ciri yang menonjol adalah tidak adanya pusat kekuasaan diluar rezim yang berkuasa.

Macridis (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 117) mengajukan tipologi partai politik berdasarkan kriteria sumber dukungan, organisasi internal dan cara tindakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Partai komprehensif, yaitu Partai yang berorientasi pada pengikut (Client Oriented).
2. Partai sektarian, yaitu partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya.

3. Partai tertutup, adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas.
4. Partai terbuka, adalah partai yang kualifikasi keanggotaannya longgar.
5. Partai Diffused, adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.
6. Partai Specialized (khusus), adalah partai yang menekankan keperwakilan (Representativeness), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu.

Almond (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015 : 500) membuat klasifikasi berdasarkan tujuan dan orientasi dari partai politik itu sendiri, menjadi empat tipe, yaitu :

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Klasifikasi Partai politik berdasarkan tujuannya menurut Almond (dalam Efriza, 2015 : 401) dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia.

2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.

3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.

Dalam pembagian yang berbeda, Andre Krouwel membagi partai politik menjadi lima model secara organisasi.

1. Partai politik elit

Partai ini merupakan partai-partai kader yang berpusat pada elit yang terstruktur secara longgar yang dipimpin oleh individu-individu terkemuka, diorganisir dalam kaukus tertutup dan lokal yang memiliki sedikit organisasi di luar parlemen. Partai-partai yang dibuat secara internal ini biasanya dipimpin oleh kader kecil individu dengan status sosial ekonomi tinggi, yang hanya memiliki hubungan lemah dengan pemilih mereka. Ciri sosiologis partai elit yang menentukan adalah status tinggi anggotanya, yang telah memperoleh posisi politik yang kuat sebelum munculnya organisasi partai ekstra-parlementer.

2. Partai politik massa

Partai massa secara eksternal diciptakan dan memobilisasi segmen luas pemilih yang sebelumnya dikecualikan dari proses politik. Partai-partai ini dicirikan sebagai partai-partai integrasi sosial, karena mereka berusaha mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial yang dikecualikan ini ke dalam tubuh politik. Karena mereka bertujuan untuk redistribusi radikal kekuatan sosial, ekonomi, dan politik, partai-partai ini menuntut komitmen yang kuat dari anggotanya, merangkum mereka ke dalam sebuah organisasi partai yang luas yang menyediakan berbagai layanan melalui jaringan padat organisasi pendukung.

3. Partai politik *catch-all*

Partai *catch-all* berasal dari partai-partai massa yang telah memprofesionalkan organisasi partainya dan menurunkan profil ideologisnya untuk menarik pemilih yang lebih luas daripada kelas asal atau basis sosial keagamaannya. Partai-partai massa berangsur-angsur berubah menjadi partai penangkap semua yang secara ideologis hambar, dan proses ini memuncak pada mudarnya oposisi yang berprinsip dan reduksi politik menjadi sekadar pengelolaan negara. Peran aktif anggota partai dalam pemilihan pimpinan partai juga menurun, yang mengikis fungsi anggota sebagai mediator antara pemilih dan pimpinan politik. Para pemimpin partai terkooptasi ke dalam kelompok kepemimpinan berdasarkan kualitas teknis dan manajerial mereka daripada karena orientasi ideologis atau asal kelas mereka. Organisasi partai *catch-all* menjadi semakin profesional dan padat modal, semakin bergantung pada subsidi negara dan kontribusi kelompok kepentingan untuk pendapatan mereka dan pada media massa komersial untuk kebutuhan komunikasi mereka. Terjadi profesionalisasi politik di mana para ahli dan manajer dengan tugas khusus memegang struktur

birokrasi partai. Partai catch-all juga menggunakan koneksi mereka dengan kelompok kepentingan sebagai sumber ide kebijakan (tanpa adanya platform kebijakan yang koheren dan independen) dan mengimplementasikan proposal kebijakan yang berasal dari kepentingan terorganisir dengan imbalan sumber daya keuangan dan dukungan pemilihan.

4. Partai politik kartel

Pada dasarnya tipe partai ini bercirikan perpaduan antara partai dalam jabatan publik dengan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik, yang terutama berorientasi pada pemeliharaan kekuasaan eksekutif. Ini adalah organisasi profesional yang sangat bergantung pada negara untuk kelangsungan hidupnya dan perlahan-lahan mundur dari masyarakat sipil, mengurangi fungsinya terutama untuk mengatur. Pada tingkat organisasi, hubungan partai kartel dengan negara sangat penting karena negara menyediakan lingkungan kelembagaan dan sumber daya yang dengannya partai-partai kartel dapat mundur dari masyarakat. Periode yang lama dalam pemerintahan mengubah struktur internal dan keseimbangan kekuasaan di dalam partai karena mereka meningkatkan status partai di jabatan publik. Sumber daya negara secara progresif diakumulasi oleh partai parlemen dan partai di kantor publik menjadi semakin independen dari keanggotaan partai di lapangan dan kantor pusatnya. Organisasi partai kartel dicirikan oleh hubungan stratarki antara berbagai tingkatan partai, baik pejabat lokal maupun partai pusat, sampai batas tertentu otonom. Ciri kedua adalah meningkatnya profesionalisasi, akumulasi sumber daya keuangan dan manusia dalam hal staf di wajah parlemen partai, yang akhirnya mengarah pada dominasi partai di jabatan publik. Dominasi ini terlihat dari semakin banyaknya perwakilan partai di kantor publik yang diangkat ke kantor pusat partai. Mengenai ideologi, persaingan semakin berfokus pada keterampilan manajerial, kompetensi dan efisiensi partai di jabatan publik.

5. Partai politik 'perusahaan bisnis'

Partai ini berasal dari inisiatif pribadi seorang pengusaha politik dan pada umumnya memiliki struktur perusahaan komersial. Citra pemimpin partai dikombinasikan dengan beberapa isu populer, dipasarkan oleh organisasi profesional ke pasar pemilu yang semakin bergejolak. Dalam hal organisasi, pihak perusahaan bisnis menghasilkan sumber dayanya dari sektor swasta, yang membedakannya dari pihak kartel yang menggunakan sumber daya negara untuk kegiatannya. Meskipun partai-partai perusahaan bisnis mungkin mendapat dukungan keuangan dari kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok tersebut bukanlah sumber pendapatan atau dukungan pemilihan utama mereka, atau saluran komunikasi utama mereka. Artinya, partai ekstra parlemen praktis

tidak berguna dan tidak akan berkembang dalam skala yang berarti. Yang mungkin dikembangkan adalah mekanisme untuk memobilisasi simpatisan untuk tampil di konferensi partai untuk menyemangati pimpinan partai. Partai-partai perusahaan bisnis hanya akan memiliki organisasi ringan dengan satu-satunya fungsi dasar memobilisasi dukungan jangka pendek pada waktu pemilihan. Partai di lapangan akan dibatasi seminimal mungkin agar tidak menghambat pimpinan dalam usahanya mendobrak kartel partai. Karakteristik kepemimpinan partai 'perusahaan bisnis' adalah popularitas pribadi, keuntungan organisasi, dan yang terpenting akses ke keahlian profesional tanpa batas dalam komunikasi massa. Penekanan ekstrem pada kepribadian individu ini mengarah pada kerentanan pihak-pihak partai perusahaan bisnis serta sentralisasi kekuasaan tingkat tinggi di sekitar pemimpin partai.

1.6.3. Konsep Organisasi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang stabil dan permanen untuk sementara waktu, yang didasarkan pada ideologi dan program pemerintah untuk menentukan tujuan, yang berupaya mencapai tujuan tersebut melalui pelaksanaan kekuasaan politik, dan berusaha untuk menduduki posisi publik. Pablo Onate membagi anatomi partai politik menjadi beberapa bagian seperti berikut.

1. Pemimpin. Memusatkan sumber daya kekuasaan dan mewakili pusat organisasi, mendistribusikan insentif dan berinteraksi dengan pemain kunci lainnya dalam sistem. Mereka membuat keputusan utama.
2. Kandidat. Calon penghuni posisi publik elektif, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka dipilih oleh anggota partai lainnya.
3. Birokrasi. Pengurus dan staf administratif yang bekerja pada kantor partai.
4. Teknisi dan intelektual. Secara permanen menasihati para pemimpin, berkolaborasi dalam penyusunan proyek dan membantu para kandidat pada saat kampanye pemilihan.
5. Militan. Mereka yang berafiliasi dengan partai, mereka berpartisipasi aktif secara konstan.
6. Afiliasi. Mereka terdaftar dalam daftar partai dan berkontribusi pada pembiayaannya melalui kuota berkala, mereka membatasi partisipasi mereka pada pemilihan internal kandidat dan otoritas.
7. Simpatisan. Mereka mendukung prinsip-prinsipnya tetapi tetap terpisah dari organisasi.

Selain itu, sebuah partai politik terdiri dari tiga komponen (Hastuti, 2015).

(1) Komponen wakil rakyat. Dalam komponen ini partai politik melakukan pendidikan dan pembangunan karakter bagi anggota partai politik yang ingin fokus terhadap pencalonan anggota legislatif sebagai representatif rakyat. Kader partai politik yang memilih komponen ini dibekali inovasi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan *public speaking*, kemampuan berargumen, kemampuan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif kemampuan memikat simpati publik yang diharapkan para kader nantinya mampu dan ahli dalam melakukan kegiatan politik baik di lembaga legislatif. Kader dibangun intuisi politiknya atau kemampuan membaca dan mengambil keputusan politik bagi kader yang merupakan suatu hal yang penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan kader-kader yang terbentuk dapat melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran jika nantinya terpilih dalam kontestasi politik.

(2) Komponen Kader Pejabat Eksekutif. Dalam komponen ini partai politik melakukan pendidikan dan pembangunan karakter bagi anggota partai politik yang ingin fokus terhadap pencalonan pejabat eksekutif. Kader partai politik yang memilih komponen ini dididik dan dibentuk karakternya sebagai calon penyelenggara negara yang ideal dan mampu memegang teguh konsensus hidup bernegara sesuai dengan UUD NRI 1945.

(3) Komponen Kepengurusan Profesional. Pengelolaan partai politik yang profesional melalui kepengurusan yang utuh tanpa adanya kepentingan elitis yang jauh dari oligarki kekuasaan di dalam tubuh partai merupakan kunci dari terselenggaranya fungsi asli partai sebagai pilar demokrasi. Sehingga kepengurusan yang profesional sangatlah dibutuhkan melihat dinamika partai politik saat ini yang cenderung memprihatinkan. Partai politik melalui kepengurusan yang profesional diharapkan dapat mewujudkan *sustainable democracy* di dalam partai. Orientasi yang dihasilkan benar-benar semata-mata keberlangsungan demokrasi internal partai politik yang bersangkutan.

Warga negara dalam demokrasi akan sering berafiliasi dengan partai politik tertentu. Keanggotaan partai dapat mencakup pembayaran iuran, perjanjian untuk tidak berafiliasi dengan banyak pihak pada saat yang bersamaan, dan terkadang pernyataan persetujuan dengan kebijakan dan platform pihak tersebut. Di negara-negara demokrasi, anggota partai politik seringkali diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih kepemimpinan partai. Anggota partai dapat menjadi basis para aktivis relawan dan donatur yang mendukung partai politik selama kampanye. Tingkat partisipasi dalam organisasi partai dapat dipengaruhi

oleh institusi politik suatu negara, dengan sistem pemilihan tertentu dan sistem partai mendorong keanggotaan partai yang lebih tinggi.

Frank J. Sorauf menggambarkan partai politik sebagai *three headed political giant*, suatu sistem interaksi yang terbagi atas :

1. Partai sebagai Organisasi. Ada mekanisme formal partai mulai dari komite lokal (daerah, kelurahan, atau kota) hingga komite pusat negara bagian, dan orang-orang yang memimpin dan memimpin di sana.
2. Partai sebagai Massa Pendukung. Bagi sebagian orang, identifikasi ini kuat, dan mereka secara konsisten mendukung kandidat yang mencalonkan diri di bawah label partai. Bagi yang lain, keterikatannya relatif lemah dan kasual. Di sini, partai ada di mata yang melihatnya sebagai kumpulan loyalitas pemilih.
3. Partai sebagai Badan Terkemuka. Sebagian besar pemimpin politik di pemerintahan dan di luarnya diidentifikasi dengan label partai. Partai terkadang digunakan untuk merujuk pada kolektivitas para tokoh yang menerima label partai, dan kebijakan partai kemudian menjadi kecenderungan kebijakan yang berlaku di kalangan kolektif ini.

Menurut Scarrow, aktivitas anggota bervariasi secara substansial sesuai dengan sifat partai dan juga berapa banyak waktu yang dimiliki anggota, minat mereka, dan peluang yang tersedia bagi mereka, yang terkategori sebagai berikut .

1. Pertama, banyak anggota bergabung dengan partai mereka terutama sebagai ekspresi dukungan, dan bahwa setelah bergabung mereka tidak aktif dan tidak berniat untuk menjadi aktif.
2. Kedua, proporsi anggota yang berpartisipasi dalam kegiatan partai secara teratur bervariasi dari 10% hingga 45%.
3. Ketiga, aktivitas anggota terjadi baik di dalam maupun di luar partai. Di dalam partai mereka menghadiri pertemuan, terlibat dalam perdebatan, dan mengatur urusan partai. Di luar partai mereka mengambil bagian dalam kampanye pemilu, berdebat kasus partai di ruang publik, menulis artikel, dan mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Dengan melihat konsep organisasi partai politik, untuk mengukur kinerja organisasi partai ada empat aspek yang dilihat Janda dan Colman sejauh mana organisasi partai berjalan.

1. Keberhasilan dalam pemilu, yang dapat diukur dengan beberapa cara dalam hal perolehan suara, perolehan kursi, pembentukan pemerintahan, dan kekuatan pemilu yang merupakan rata-rata proporsi suara yang dimenangkan dalam pemilu legislatif atau parlemen nasional.
2. Keluasan kegiatan, yang berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan partai daripada pada konsekuensi yang diperhitungkan dari tindakan mereka. Ini diukur dengan sejauh mana partai mempropagandakan gagasan atau program dan menyediakan kesejahteraan anggota.
3. Kohesi partai, dimana anggota partai diharapkan menjalankan kebijakan partai, terutama dalam memberikan suara pada isu-isu di legislatif, di mana partai yang kohesif sempurna akan memberikan suara dengan suara bulat. Semakin kohesif sebuah partai, semakin besar perannya sebagai agen pembuat kebijakan.

Konsep organisasi partai politik merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah partai. Robert Michels menyatakan bahwa dimensi organisasi sangat mempengaruhi partai politik dengan mengacu pada :

1. Kohesi internal. Dalam formasi politik kecil lebih mudah untuk menyepakati nilai dan tujuan. Tetapi jika mereka meningkatkan proporsi mereka akan ada heterogenitas yang lebih besar.
2. Gaya politik. Semakin besar kelompok maka gaya politiknya lebih pragmatis.
3. Mobilisasi afiliasi. Ukuran bervariasi dalam arah yang berlawanan dengan partisipasi.
4. Birokratisasi. Seiring pertumbuhan organisasi, pembagian kerja menjadi lebih menonjol. Ketidaksetaraan internal dipupuk demi efisiensi partai.

Panebianco menganggap bahwa hubungan kausalitas yang kaku seperti itu tidak dapat dibangun. Ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan profil organisasi partai dan memungkinkan kita untuk mengetahui harapannya untuk bertahan atau sukses adalah :

1. Kompetensi. Sejauh mana menjadi aktor yang sangat diperlukan untuk memainkan peran tertentu.

2. Manajemen hubungan dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi, kemampuan merumuskan strategi negosiasi, membangun aliansi dan konflik dengan organisasi lain.
3. Komunikasi. Kontrol yang dilakukan atas saluran informasi internal dan eksternal.
4. Aturan formal. Penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuatan untuk mengubah aturan, kemungkinan penyimpangan dan sejauh mana undang-undang dipatuhi.
5. Pembiayaan. Ini adalah masalah yang sangat kontroversial. Ada kriteria yang berbeda. Beberapa berpendapat bahwa seharusnya hanya selama kampanye pemilu untuk memastikan partisipasi semua pihak. Yang lain menganggap bahwa negara harus menanggung semua biaya untuk pemeliharaan dan operasinya. Mereka yang mendukung pembiayaan swasta berpendapat bahwa biaya ekonomi harus ditanggung oleh warga negara yang bersangkutan. Kontribusi dapat didasarkan pada posisi yang diperoleh atau berdasarkan persentase suara yang diterima, terlepas dari apakah telah memperoleh perwakilan atau tidak. Yang terbaik adalah menggabungkan kedua kriteria.
6. Rekrutmen. Hal ini terkait penerimaan, karir, dan persyaratan permanen.

Sebuah organisasi partai adalah struktur formal partai politik dan anggota aktifnya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perilaku partai dan mendukung kandidat partai. Ini adalah komponen penting dari setiap partai yang sukses karena memikul sebagian besar tanggung jawab untuk membangun dan memelihara merek partai. Organisasi kepartaian juga memainkan peran kunci dalam membantu memilih dan memilih kandidat untuk jabatan publik.

1.7. Institusionalisasi (Pelebagaan) Partai Politik

Terkait dengan masalah pelembagaan partai politik, Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) mencoba memberikan penjelasan tentang pelembagaan partai. Pelembagaan partai politik merupakan proses penetapan partai politik baik secara struktural dalam rangka. Mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap maupun budaya. (*the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)” (Ridha, 2016). Proses pelembagaan ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan menghasilkan sebuah tabel empat sel yaitu :

1. Derajat kesisteman (*systemnes*), sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
2. Derajat identitas nilai (*value infusion*), suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.
3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.
4. Derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural (Ridha, 2016).

Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan institusionalisasi partai politik sebagai sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value dan stability tertentu. Pendapat Huntington itu mencoba menjelaskan bahwa salah satu indikator kekuatan institusionalisasi partai ialah keberhasilannya memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya hingga terjadi stabilitas internal dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasan adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (Hidayat, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, ada dua aspek yang terkandung dalam proses institusionalisasi, yakni aspek struktural-kultural dan aspek internal-eksternal.

Pertama, Derajat Kesisteman atau *systemness* merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam AD dan ART partai politik. Derajat kesisteman sangat krusial dalam menentukan sehat tidaknya partai politik karena berkaitan dengan proses berjalannya fungsi-fungsi partai, mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik internal. Dalam hal ini, kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi sangat penting. Hal ini karena semua fungsi dan mekanisme partai harus dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang telah disepakati dan ditetapkan. AD/ART itu sendiri wajib dimuat dalam akta notaris pendirian partai politik ketika partai didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa AD setidaknya wajib memuat: a) asas dan ciri partai; b) visi dan misi partai; c) nama, lambang, dan tanda gambar partai; d) tujuan dan fungsi partai; e) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f) kepengurusan partai; g) mekanisme rekrutmen keanggotaan partai dan jabatan politik; h) sistem kaderisasi; i) mekanisme pemberhentian anggota partai; j) peraturan dan keputusan

partai; k) pendidikan politik; l) keuangan partai; dan m) mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai. Adanya kesepakatan partai dalam menetapkan aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme tertentu dalam AD/ART dan pemeriksaan aturan itu oleh Kementerian menjadikan AD/ART sebagai konstitusi partai yang sakral untuk dipatuhi oleh para pengurus dan anggota partai. AD/ART pun jelas menjadi tolak ukur kepatuhan dan disiplin organisasi.

Kedua, Derajat Identitas Nilai, berkaitan dengan ideologi atau platform partai, berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai tersebut. Derajat identitas nilai suatu partai berkaitan dengan hubungan partai dengan kelompok populis (popular group) tertentu, apakah suatu partai mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, baik berdasarkan kelas maupun komunitas agama atau etnik tertentu (Romli, 2008).

Dimensi identitas nilai diukur melalui sejauh mana tindakan partai didasarkan pada identifikasi terhadap ideologi atau platform partai, positif atau tidak relasi yang dikonstruksi partai dengan basis sosial pendukungnya, dan sejauhmana anggota partai mampu mengidentifikasi pola dan arah perjuangan partai. Dalam hal ini, ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh luput dari partai politik. Ideologi secara umum membantu partai dalam mengintegrasikan massa pendukung dan mengidentifikasi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi (Haris, 2020). Hasil identifikasi tersebut idealnya dirumuskan partai dalam bentuk program kerja dan kebijakan strategis sebagai jalan keluar atas problematika yang dialami rakyat Indonesia. Melalui program kerja dan kebijakan itu pula, publik bisa menilai apakah pola dan arah perjuangan partai masih sesuai dengan ideologi yang dipijaknya atau justru sebaliknya.

Meski memang sepanjang Reformasi bergulir, tidak ada perbedaan signifikan dalam hal ideologi dan kebijakan yang diambil partai-partai di Indonesia. Satu-satunya keterbelahan (division) yang jelas dalam dunia kepartaian Indonesia adalah soal sebesar apa partai mendudukan peran Islam dalam kehidupan publik (Muhtadi, 2019). Bahkan, sekalipun terdapat perbedaan ideologis antara partai Islam dan non-Islam, pada kenyataannya, tidak sedemikian tampak dalam program kerja di ranah vital seperti kebijakan sosial dan keuangan. Hal itu menandakan bahwa ideologi partai cenderung didistorsikan sekadar sebagai visi dan misi normatif tanpa kejelasan argumentatif keterpilihan suatu program. Maka dari itu, ideologi tidak boleh berhenti sebagai dokumen tertulis untuk memenuhi prasyarat kelengkapan administrasi AD/ART yang diharuskan oleh undang-undang. Partai harus mampu menawarkan visi masa depan dan haluan politik yang jelas; yang diterjemahkan dalam bentuk program kerja dan alternatif kebijakan—yang semakin mendekatkan Indonesia kepada cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Ketiga, Derajat Otonomi. Derajat otonomi lebih menekankan aspek relasi antara partai dengan aktor di luar partai, baik sumber otoritas seperti penguasa maupun pemerintah, atau sumber dana misalnya, pengusaha, penguasa, negara, atau lembaga luar lainnya serta sumber dukungan massa seperti organisasi masyarakat. Hal yang terpenting dalam dimensi ini adalah: Pertama, apakah partai tergantung pada aktor luar tersebut. Kedua, apakah keputusan partai turut ditentukan oleh aktor luar. Idealnya, partai politik tersebut melembaga apabila semua keputusan partai yang dibuat partai terbebas dari intervensi pihak luar (Wahid, 2018).

Dimensi otonomi diukur dari sejauhmana partai mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa didikte oleh aktor luar partai. Setidaknya, ada tiga aktor luar partai yang selama ini kerap ikut campur dalam pengambilan keputusan partai, yakni pihak otoritas (penguasa dan pemerintah), pihak penyedia dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan basis massa pendukung (organisasi masyarakat). Seeloknya, partai yang ingin mendemokratisasikan diri harus mampu menciptakan relasi interdependen dan linkage dengan aktor luar. Interdependen berarti partai dalam menjalankan perannya tidak hanya tergantung kepada aktor luar. Dan, linkage berarti partai mampu menjalin hubungan dengan aktor luar untuk kemudian dijadikan sebagai jaringan (network) yang mendukung keputusan partai. Kedua relasi itu baru akan terjalin secara maksimal apabila skema pembiayaan kegiatan partai tidak berbasis pada pemberian dari aktor luar. Jadi, partai akan memiliki otonomi untuk membuat keputusan jika ada optimalisasi skema pembiayaan kegiatan partai dari internal partai itu sendiri (iuran anggota, kontribusi pengurus, dan lainnya).

Keempat, Derajat reifikasi atau derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik (Susanto, 2018). Keberadaan partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Prattama, 2015). Dimensi citra opini publik merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan partai menanamkan keberadaan, citra atau brand name pada imajinasi publik seperti yang dimaksudkan oleh partai melalui dimensi identitas nilai mereka. Sayangnya, yang terjadi selama ini, model genetik partai-partai di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kharisma figur. Itulah mengapa publik secara general ketika mendengar kata PDI Perjuangan akan membayangkan Megawati Soekarnoputri, Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gerindra adalah Prabowo Subianto; sebelum sempat memikirkan ideologi atau haluan politik partai tersebut.

Untuk itu, tingkat keberhasilan institusionalisasi partai dari dimensi citra opini publik adalah ketika sosok dan kiprah partai politik didefinisikan masyarakat atau publik sesuai dengan identitas nilai (ideologi atau platform) partai. Dengan menjadikan identitas nilai sebagai citra partai yang tertanam pada imajinasi publik, maka setidaknya publik diharapkan dapat memahami alasan partai mengambil suatu tindakan tertentu.

Selain itu, pada dimensi ini, agar fungsi dari waktu dan kiprah partai bekerja secara maksimal, maka perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partai melalui kaderisasi. Hal ini karena salah satu permasalahan paling menonjol yang dialami oleh partai politik adalah maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kader partai yang telah duduk di kursi anggota DPR maupun pejabat negara lainnya (Imansyah, 2012). Belum lagi, persoalan menguatnya politik kekerabatan dalam kaderisasi yang berpotensi menjadikan politik dikuasai oleh bossism berbasis teritorial sehingga sulit mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial (Harjanto, 2011). Hal ini berimplikasi pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik atau memburuknya citra (brand name) partai pada imajinasi publik. Pada skenario terburuk, publik akhirnya acuh tak acuh dengan setiap kegiatan politik sehingga proses demokratisasi pun mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

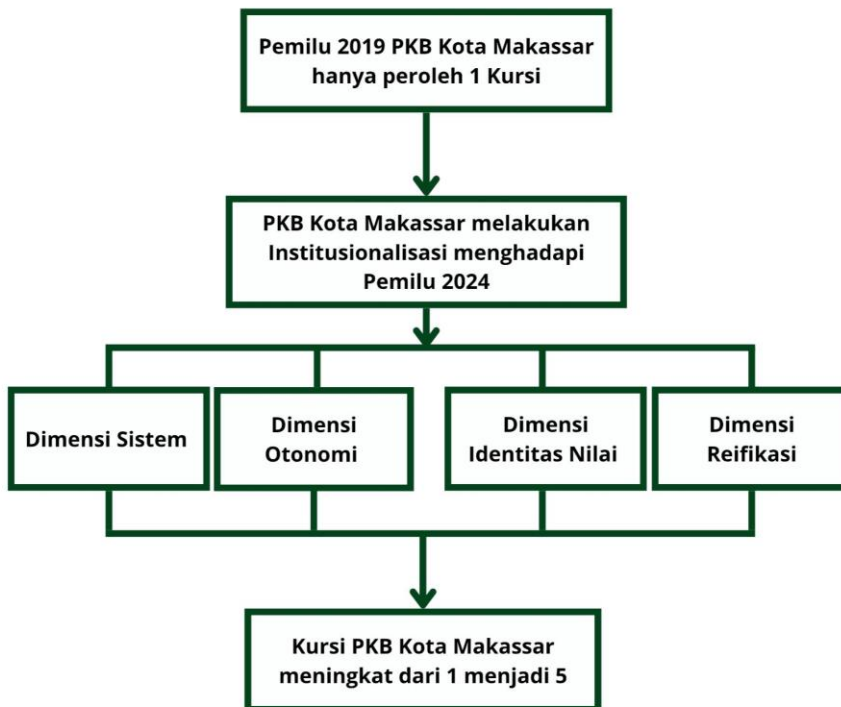
1.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svason adalah proses pematangan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Institusionalisasi partai politik dapat dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi kesisteman, identitas, otonomi, dan reifikasi. Institusionalisasi dalam sebuah partai dapat mempengaruhi hasil-hasil elektoral yang dicapai dalam pemilu, seperti yang dialami oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Makassar.

PKB mampu mendudukkan semua Calegnya di lima Dapil. Mereka berhasil mengumpulkan total 66.888 suara. Diketahui dari Pemilu 2019, PKB Makassar hanya meraih satu kursi di DPRD Makassar, yang diisi oleh Imam Musakkar. Sebagai sebuah partai yang didominasi oleh orang NU, PKB mampu memperoleh hasil signifikan di Pemilu 2024. Dari hanya 1 kursi di DPRD Kota Makassar, kini menjadi 5 kursi dan memiliki satu fraksi tersendiri. Caleg-caleg yang terpilih juga

berasal dari latar belakang yang sangat beragam, seperti dokter dan akademisi. PKB mampu melakukan konsolidasi internal sedemikian rupa sehingga menghasilkan capaian yang membanggakan di Pemilu 2024 dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Terjadi perubahan dan hasil yang signifikan dalam kerja politik yang dilakukan PKB Kota Makassar.

1.9. Skema Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menguraikan pendekatan dan tipe penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data untuk dapat menjelaskan upaya DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar membangun dan mengembangkan partainya dalam dimensi identitas dan reifikasi.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik. Tipe penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Penelitian ini menggambarkan upaya DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar menghadapi Pemilu 2024 dengan melakukan perubahan pada institusionalisasi partai dalam dimensi identitas nilai dan reifikasi sehingga memberikan pengaruh signifikan pada perolehan kursi.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada tempat peneliti tinggal dan mengamati aktivitas dan perkembangan situasi politik di Kota Makassar. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang identik dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama mampu memberikan kejutan pada hasil Pemilu 2024 di level DPRD Kota Makassar, dimana pada 2019 sebelumnya PKB hanya memperoleh 1 kursi untuk pertama kalinya, kemudian mampu meraih 5 kursi dengan persebaran merata di setiap dapil. Dari hasil Pemilu 2024, PKB mampu membentuk fraksi utuh di DPRD Kota Makassar periode 2024-2029.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan yaitu pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara akan diolah menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara informan sebelumnya dikonfirmasi kebenarannya dan diperkaya pada jawaban informan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang dapat berasal dari berbagai tulisan, media, dan publikasi kegiatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berita di media online yang berkaitan dengan aktivitas politik Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Makassar dalam menghadapi Pemilu 2024. Data sekunder menjadi sumber data bagi peneliti untuk memperkuat apa yang diperoleh dari data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara mendalam, dimana ada proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur. Wawancara diarahkan mengenai bagaimana institusionalisasi dimensi identitas nilai dan reifikasi pada DPC PKB Kota Makassar, sesuai rencana pertanyaan utama yang telah disusun, dan bila informan memberikan jawaban yang menarik untuk digali maka peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi berupa data sekunder seperti arsip, dokumen, laporan, berita, gambar, maupun berbagai tulisan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara terhadap institusionalisasi partai politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Makassar.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun informan yang telah terlibat dalam penelitian ini yaitu :

1. Fauzi Andi Wawo, Ketua DPC PKB Kota Makassar
2. Fahrizal Arrahman Husain, anggota DPRD Kota Makassar F-PKB
3. Basdir, anggota DPRD Kota Makassar F-PKB
4. Zulhajar, anggota DPRD Kota Makassar F-PKB
5. Imam Musakkar, anggota DPRD Kota Makassar F-PKB
6. Andi Makmur Burhanuddin, anggota DPRD Kota Makassar F-PKB

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan itu, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut. Dalam analisis data kualitatif ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Reduksi Data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.